



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati mencabut Peraturan daerah yang telah dievaluasi peraturan perundang-undangannya berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-79/XII/2017 tentang Persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap Pencabutan Enam Puluh Delapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 2 Tahun 1999 tentang Nama-Nama Jalan Dalam Daerah Tingkat II Kutai;
2. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 3 Tahun 1999 tentang Peraturan Penangkapan Ikan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai;
3. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 4 Tahun 1999 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
4. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 5 Tahun 1999 tentang Izin Pengeboran, Pengembalian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
5. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 9 Tahun 1999 tentang Izin Bongkar Muat Barang Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
6. Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 4 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Pada Kecamatan Muara Jawa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Pada Kecamatan Kota Bangun;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Kecamatan Muara Badak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kutai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kabupaten Kutai;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pemberian Perijinan Usaha Produsen Benih/Bibit Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Kutai;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian Perijinan Usaha Perusahaan Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras dalam Wilayah Kabupaten Kutai;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Kutai;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Pemotongan Hewan, Penjualan Daging Hewan Dan Usaha Pemotongan Unggas dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kutai Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Pemotongan Hewan, Penjualan Daging Hewan Dan Usaha Pemotongan Unggas
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kabupaten Kutai;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengusaha Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Kutai;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu Kabupaten Kutai;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2001 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja WNA Pendetang;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2001 tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan Tenaga Indonesia;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Angkutan Barang atau Alat Berat yang Melebihi Kelas Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Kutai Kartanegara;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta dan Sarana Kesehatan Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kabupaten Kutai Kartanegara;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Retribusi Pendaftaran Pengusaha Kecil dan Menengah dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2003 tentang Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pencabutan Perda Daerah Kabupaten Kutai Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pengujian Mutu Secara Organoleptik pada Laboratorium Hasil Perikanan di Kabupaten Kutai;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja DISDUKPIIL dan KB Kabupaten Kutai Kartanegara;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Panti Asuhan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan Retribusi Pendaftaran Pengusaha Kecil dan Menengah dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi serta Pendaftaran Pengusaha Kecil dan Menengah dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

54. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2004 tentang Restrukturisasi Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuangan Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Pertambangan Batubara;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Pada partai Kabupaten Kutai Kartanegara;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan Kayu;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketentuan Izin Mendirikan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
63. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan;

65. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 tahun 2009 Penataan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Bersama di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu *dicabut sebagian pasal 14 sampai dengan pasal 18*;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah;
68. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Februari 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

MARLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 103
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 (4/1/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002